

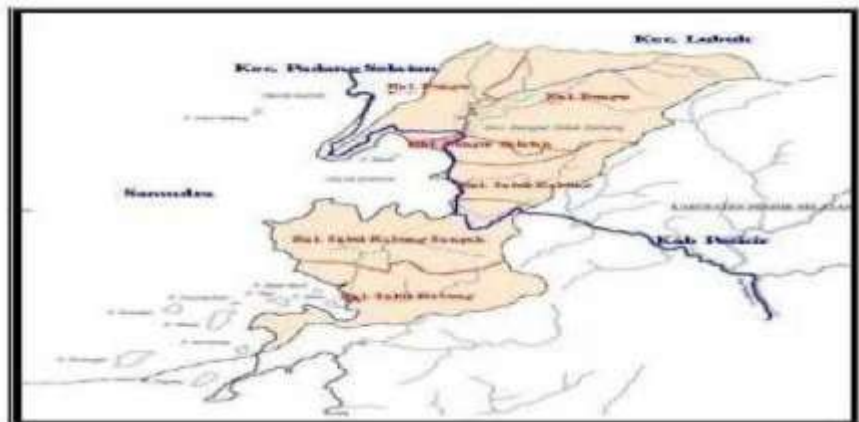
BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Bungus Teluk Kabung

3.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan salah satu dari sebelas kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, kecamatan ini terletak pada koordinat $0^{\circ}54'$ hingga $1,80^{\circ}$ Lintang Selatan serta $100^{\circ}34'$ Bujur Timur. Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki luas wilayah sebesar $100,78 \text{ km}^2$ atau setara dengan 14,50 persen dari keseluruhan luas Kota Padang (BPS Kota Padang, 2023).



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Secara administratif, Kecamatan Bungus Teluk Kabung berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Padang Selatan di sebelah utara, serta Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah timur. Posisi yang langsung menghadap Samudra Hindia menjadikan kecamatan ini memiliki karakteristik kawasan pesisir yang menonjol, dengan garis pantai yang panjang serta teluk-teluk alami, salah satunya Teluk Bungus, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pelabuhan dan perikanan (BPS Kota Padang, 2023).

Kondisi topografi wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan, disertai dataran rendah yang membentang di sepanjang garis pesisir. Keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur di wilayah ini menjadikannya sebagai salah satu simpul ekonomi penting di Sumatera Barat (Nasution dan Hidayat, 2021: 143). Selain itu, terdapat beberapa pulau kecil di lepas pantai, seperti Pulau Pasumpahan, yang telah berkembang menjadi destinasi wisata bahari yang diminati wisatawan lokal maupun mancanegara (Sari, 2020: 22).

Dari segi iklim, Kecamatan Bungus Teluk Kabung beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini mendukung tumbuhnya vegetasi hutan tropis di daerah perbukitan serta ekosistem pesisir berupa mangrove di beberapa kawasan pantai. Perpaduan antara kawasan pesisir, laut, perbukitan, dan pulau-pulau kecil menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar di sektor perikanan, kepelabuhanan, dan pariwisata bahari (BPS Kota Padang, 2023).

3.1.2 Pembagian Wilayah Administrasi

Kecamatan Bungus Teluk Kabung secara administratif terbagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu Teluk Kabung Selatan, Bungus Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara, Bungus Timur, dan Bungus Barat. Kelurahan Bungus Timur memiliki luas wilayah terbesar, yakni 25,81 km² atau sekitar 25 persen dari total luas kecamatan, sedangkan Kelurahan Bungus Selatan memiliki luas terkecil sebesar 4,85 km² (BPS Kota Padang, 2023).

Tabel 3.1 Luas Wilayah per Kelurahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Teluk Kabung Selatan	14,85	14,74
2	Bungus Selatan	4,85	4,81
3	Teluk Kabung Tengah	18,30	18,16
4	Teluk Kabung Utara	20,56	20,40
5	Bungus Timur	25,81	25,61
6	Bungus Barat	16,41	16,28
	Total	100,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam Angka* 2023. <https://padangkota.bps.go.id>. Diakses pada 19 Juni 2026.

3.1.3 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 28.690 jiwa, meningkat dari 28.110 jiwa pada tahun 2022, dengan pertambahan sebesar 580 jiwa atau sekitar 2,06 persen (BPS Kota Padang, 2023). Kepadatan penduduk kecamatan ini tercatat sebesar 284,6 jiwa per km², jauh di bawah rata-rata kepadatan Kota Padang secara keseluruhan. Persebaran penduduk cenderung tidak merata, dengan konsentrasi permukiman berada di kawasan pesisir, sekitar area pelabuhan, dan sepanjang jalur transportasi utama.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2022-2023

No.	Kelurahan	2022 (Jiwa)	2023 (Jiwa)	Pertumbuhan (Jiwa)
1	Teluk Kabung Selatan	2.100	2.187	+87
2	Bungus Selatan	3.378	3.427	+49
3	Teluk Kabung Tengah	3.603	3.696	+93
4	Teluk Kabung Utara	4.487	4.535	+48
5	Bungus Timur	6.880	7.052	+172
6	Bungus Barat	7.652	7.793	+141
	Total	28.110	28.690	+580

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam Angka 2023*. <https://padangkota.bps.go.id>. Diakses pada 19 Juni 2026.

Struktur usia penduduk di Kecamatan Bungus Teluk Kabung didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai sekitar 63 persen dari total penduduk, diikuti kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) sebesar 29 persen, dan lansia (65 tahun ke atas) sebesar 8 persen (BPS Kota Padang, 2023). Dominasi usia produktif ini merupakan potensi modal sosial yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, apabila tidak diiringi dengan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan yang memadai, tingginya aktivitas penduduk usia produktif justru berkontribusi pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya (Nasution dan Hidayat, 2021: 145).

Tabel 3.3 Data Kependudukan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2023

No.	Indikator Kependudukan	Data
1	Jumlah Penduduk	28.690 jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	7.823 KK
3	Kepadatan Penduduk	284,6 jiwa/km ²
4	Rasio Jenis Kelamin	98,4 (laki-laki per 100 perempuan)
5	Penduduk Usia Produktif	±63 persen dari total
6	Jumlah Kelurahan	6 Kelurahan
7	Jumlah RT / RW	124 RT / 29 RW

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam Angka 2023*. <https://padangkota.bps.go.id>. Diakses pada 19 Juni 2026.

3.1.4 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Secara sosial-ekonomi, sebagian besar masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung sangat menggantungkan penghidupannya pada sektor informal, terutama sebagai nelayan tradisional, pedagang kecil, buruh harian lepas, dan pelaku usaha pariwisata. Keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur juga menyerap tenaga kerja di sektor kepelabuhanan dan logistik (BPS Kota Padang, 2023). Ketergantungan pada sektor informal menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung fluktuatif dan tidak stabil, sehingga persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, sering kali belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari (Nasution dan Hidayat, 2021: 147).

Tabel 3.4 Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bungus Teluk Kabung

No.	Sektor Mata Pencaharian	Persentase (%)
1	Perikanan dan Kelautan	31,5
2	Perdagangan dan Jasa	22,3
3	Buruh / Tenaga Kerja Harian	18,7
4	Kepelabuhanan dan Transportasi	12,4
5	Pariwisata	8,6
6	Pertanian	4,2
7	Lainnya	2,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam Angka* 2023. <https://padangkota.bps.go.id>. Diakses pada 19 Juni 2026.

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat di wilayah ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sementara sebagian kecil lainnya telah mengenyam pendidikan tinggi. Soekanto (2020: 67) menegaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang secara langsung memengaruhi pengetahuan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi ini relevan dengan situasi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di mana rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat berimplikasi pada terbatasnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.

Dari sisi budaya, nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah masih terpelihara dengan baik di tengah masyarakat Bungus Teluk Kabung. Kegiatan kerja bakti dan partisipasi dalam

kegiatan sosial kemasyarakatan masih rutin dilaksanakan. Namun demikian, kuatnya nilai sosial tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran hukum yang memadai dalam hal pengelolaan sampah. Dalam praktiknya, masih kerap dijumpai perilaku membuang sampah sembarangan, baik di lahan kosong, selokan, maupun di kawasan pesisir dan badan sungai (Firmansyah, 2021: 89). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai sosial yang dimiliki masyarakat dengan kepatuhan terhadap norma hukum lingkungan.

Aktivitas pariwisata yang berkembang di kawasan pesisir Bungus Teluk Kabung memberikan dampak ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, sektor pariwisata meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui sektor jasa dan perdagangan. Di sisi lain, meningkatnya kunjungan wisatawan turut menambah volume timbulan sampah, khususnya sampah plastik dan kemasan makanan (Sari, 2020: 25). Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah wisata ini berpotensi mencemari lingkungan pesisir, merusak ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta menurunkan kualitas daya tarik wisata itu sendiri.

3.1.5 Sarana dan Prasarana Wilayah

Ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Bungus Teluk Kabung secara umum masih belum setara dengan kecamatan-kecamatan yang berada di pusat kota. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis yang relatif jauh dari pusat perkotaan serta karakteristik topografi yang didominasi perbukitan (BPS Kota Padang, 2023). Keterbatasan sarana prasarana ini turut berdampak pada layanan persampahan yang diterima masyarakat, sebagaimana tercermin dari minimnya fasilitas pengumpulan dan pengolahan sampah yang tersedia di wilayah ini.

Tabel 3.5 Monografi Sarana dan Prasarana Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2023

No.	Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD) / Sederajat	13 unit
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4 unit
3	Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sederajat	2 unit
4	Puskesmas	1 unit
5	Puskesmas Pembantu	3 unit
6	Posyandu	25 unit
7	Masjid	38 unit
8	Musala	22 unit
9	Pasar Tradisional	2 unit
10	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	4 kontainer, 1 bentor
11	Bank Sampah Aktif	Tidak tersedia
12	TPS 3R	Tidak tersedia

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Data Sarana Persampahan Kota Padang Tahun 2026.*

Data pada Tabel 3.5 memperlihatkan kondisi fasilitas persampahan yang sangat minim di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Tidak tersedianya Bank Sampah aktif dan TPS 3R di wilayah ini merupakan salah satu indikator nyata dari ketimpangan distribusi layanan persampahan (DLH Kota Padang, 2026:7).

3.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang

3.2.1 Sejarah Pembentukan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang merupakan hasil penggabungan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang. Penggabungan ini dilaksanakan pada awal tahun 2017 seiring dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di seluruh Indonesia (PP No. 18 Tahun 2016). DLH Kota Padang berkedudukan di Jalan Simpang Rambutan, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Dalam struktur organisasinya, DLH Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 (empat) bidang kerja dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Keempat bidang tersebut adalah: (1) Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (2) Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan, (3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta (4) Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2016).

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah “Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan di Kota Padang.” Untuk mewujudkan visi tersebut, DLH Kota Padang mengemban empat misi utama. Pertama, mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik dalam rangka mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Kedua, mewujudkan pemanfaatan

potensi sumber daya alam yang sesuai dengan fungsi tata ruang kota. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Keempat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama pengelolaan lingkungan hidup dengan instansi pemerintah lainnya serta sektor swasta (DLH Kota Padang, 2024).

3.2.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang didukung oleh 847 orang pegawai yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Komposisi pegawai yang beragam ini mencerminkan kebutuhan operasional DLH yang besar mengingat cakupan tugasnya meliputi seluruh wilayah Kota Padang (DLH Kota Padang, 2025).

Tabel 3.7 Jumlah Pegawai DLH Kota Padang Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian

No.	Golongan / Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	48
3	Golongan II	154
4	Golongan I	51
5	Pegawai Honor	116
6	Pegawai Kontrak	270
7	Petugas Kebersihan Kecamatan	200
	Jumlah	847

Tabel 3.8 Jumlah PNS DLH Kota Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (S2)	8
2	Sarjana (S1)	40
3	Diploma III (D3)	10
4	SMA / Sederajat	129
5	SMP / Sederajat	38
6	SD / Sederajat	36
	Jumlah	261

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Data Kepegawaian DLH Kota Padang Tahun 2025

Data pada Tabel 3.8 menunjukkan bahwa sebagian besar PNS DLH Kota Padang berlatar belakang pendidikan SMA ke bawah, yakni sebanyak 203 dari 261 orang atau sekitar 77,8 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan kompetensi teknis di internal DLH yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, termasuk upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah (DLH Kota Padang, 2025).